

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong agenda transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi publik, atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Langkah ini merupakan bagian krusial dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel [1]. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi strategi utama untuk menyederhanakan alur kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat [2]

Meskipun urgensi digitalisasi semakin tinggi, banyak instansi pemerintah masih menghadapi tantangan akibat ketergantungan pada proses administrasi yang bersifat manual. Proses yang bergantung pada pencatatan fisik atau pengolahan data secara terpisah sering kali berjalan lambat, membuka peluang besar terhadap kesalahan manusia (*human error*), dan menyebabkan pekerjaan yang sama harus dilakukan berulang kali [3]

Pentingnya literasi digital bagi masyarakat tentunya membuat perusahaan hingga instansi pemerintah juga memanfaatkan perkembangan IT untuk mengembangkan bisnis bagi organisasi mereka. Seperti perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi digital dalam operasional sehari-hari, seperti e-commerce, perbankan digital, dan layanan berbasis aplikasi. Pihak-pihak tersebut memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar. Contoh nyata dari penerapan literasi digital pada instansi pemerintah adalah perancangan sistem informasi administrasi surat masuk dan surat keluar pada Dinas Kominfo Serdang Bedagai, hasil dari perancangan tersebut adalah sistem informasi tersebut mempermudah pengelolaan dokumen surat masuk dan keluar, dashboard data real time, dan meningkatkan transparansi dalam komunikasi antar departemen dalam organisasi[4].

BNI Blitar, 24 Januari 2025 Nomor : BLT / 5.3 / 2025 Lamp. : - Kepada : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Di tempat Perihal : Permohonan Permintaan Data Calon Pensiunan ASN Thn 2025 s.d. Thn 2030 Menunjuk pada perihal pokok surat di atas, sehubungan dengan kerja sama BNI Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar, kami bermaksud untuk memberikan pelayanan keuangan khususnya bagi para calon pensiunan ASN Kota Blitar tahun 2025 s.d. 2030 berupa fasilitas pinjaman BNI Fleksi Pra Pensiun. Terkait hal tersebut, mohon bantuan data calon pensiunan ASN 2025 s.d 2030 untuk selanjutnya kami berikan penawaran. Kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi PIC kami an. Dewi Tirta Sari dengan nomor handphone 081334889292. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  Kepala BPS Kota Blitar Hanung Widiyanto, SST, S, S, ME, MPP NIP. 198112062009021001	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR Jalan Kenari No. 62, Blitar 68134 Telp. (0342) 8118012 E-mail: bps@bpskota.go.id Website: bpskota.go.id Nomor : S-014/35720KS.000/2025 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permintaan Data Publikasi Kota Blitar Dalam Angka 2025 Yth. Kepala/pimpinan OPD terlampir di Tempat Dalam rangka menunjang percepatan penyediaan data dan perencanaan pembangunan daerah maka penyusunan Publikasi Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025 akan dilakukan lebih awal. Publikasi tersebut direncanakan rilis pada bulan Februari 2025, untuk itu mohon bantuan dari kerjasama Saudarail untuk mengisi format permintaan data (sebagaimana terlampir) sebagai bahan penyusunan Publikasi Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025. Data sebagaimana tersebut di atas diharapkan sudah kami terima paling lambat Tanggal 24 Januari 2024. Data tersebut dapat dikirimkan melalui : - alamat kantor BPS Kota Blitar (Jl. Kenari No. 62 Blitar); atau - email kantor (bps3572@bps.go.id); atau - entri data secara mandiri melalui : https://blita.apolabs.com/view/daasdatasektorah2 pada menu Input Data; atau - hubungi 0823-3377-0344 (an Sdr Ani) jika data sudah tersedia dan siap diambil Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  Kepala BPS Kota Blitar Hanung Widiyanto, SST, S, S, ME, MPP NIP. 198112062009021001
---	---

Gambar 1.1 Surat Permohonan Data dari Instansi Lain

Proses permohonan data pegawai di Pemerintah Kota Blitar saat ini masih dilakukan secara manual melalui komunikasi menggunakan surat resmi. Gambar 1.1 merupakan contoh surat permohonan data dari berbagai instansi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Metode ini menyebabkan proses pengumpulan dan penyampaian data pegawai menjadi tidak efisien karena harus dilakukan secara berulang setiap kali ada permintaan dari instansi terkait. Selain itu, ketiadaan sistem yang terintegrasi membuat dokumentasi data pegawai tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses pencarian informasi di masa mendatang. Sistem manual ini juga berisiko meningkatkan ketidaksesuaian data akibat kesalahan dalam pencatatan, duplikasi, atau bahkan kehilangan informasi penting yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian.

Sistem yang masih berbasis komunikasi manual ini juga menyebabkan pekerjaan yang berulang setiap tahunnya. Setiap kali ada permintaan data dari instansi terkait, pegawai harus mengumpulkan dan menyusun informasi dari awal karena tidak adanya sistem yang mampu menyimpan dan memperbarui data secara otomatis. Hal ini tidak hanya membebani pegawai yang bertanggung jawab dalam administrasi kepegawaian, tetapi juga memperlambat proses penyampaian data. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi permohonan data pegawai berbasis web yang dapat mengotomatisasi permohonan data pegawai agar lebih efisien, terdokumentasi dengan

baik, serta dapat mengurangi pekerjaan yang berulang setiap tahunnya. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, permohonan data pegawai akan lebih cepat, akurat, serta memudahkan dalam proses permintaan dan distribusi informasi bagi instansi terkait.

Sebagai solusi atas permasalahan yang ada, dirancang sebuah sistem informasi kepegawaian bernama SIPDP (Sistem Informasi Permohonan Data Pegawai) yang memungkinkan instansi pemohon data untuk langsung mengakses sistem secara mandiri. Dengan adanya sistem ini, proses pengajuan permintaan data pegawai dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu melalui komunikasi manual seperti *WhatsApp* atau surat resmi, di mana setiap instansi yang memiliki kewenangan dapat mengajukan permintaan data melalui sistem, dan sistem akan secara otomatis memproses serta menyediakan data yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Dengan mekanisme ini, waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan dan penyampaian data pegawai akan diharapkan menjadi lebih cepat dan lebih efisien

Selain mempermudah akses bagi instansi pemohon data, SIPDP juga dilengkapi dengan fitur pengelompokan data pegawai berdasarkan berbagai kriteria, seperti jabatan fungsional, unit kerja, agama, pendidikan, dan kriteria lain. Dengan adanya fitur ini, data pegawai dapat disusun secara lebih sistematis, sehingga mempermudah pencarian serta analisis statistik yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Blitar dan instansi terkait.

Sistem ini akan dikembangkan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). RAD adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental, yang dirancang khusus untuk proyek dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat. Metode ini memiliki keunggulan utama berupa proses pengembangan yang cepat dan efisien serta melibatkan pengguna secara langsung dalam setiap tahap pengembangannya [5]. Penelitian yang dilakukan oleh Rahardja seperti yang dikutip dari [6] membuktikan bahwa RAD merupakan metode yang cepat dan efisien dalam mengembangkan suatu sistem.

Selain itu, metode RAD memberikan solusi yang kuat dan andal dalam menjaga integritas serta privasi data. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, sistem berbasis RAD memiliki ketahanan tinggi terhadap perubahan atau penghapusan yang tidak sah, sehingga memberikan tingkat keamanan yang lebih baik bagi pengguna, sebagaimana yang dikutip dalam [7]. Dengan adanya sistem ini, pegawai pada Pemerintah Kota Blitar akan lebih terbantu dan lebih efisien dalam kinerjanya serta meningkatkan transparansi antar departemen. Penelitian ini bertujuan untuk

merancang dan mengembangkan SIPDP, sistem ini akan diharapkan dapat mempermudah permintaan data secara otomatis, mengurangi ketergantungan pada komunikasi manual, serta menyediakan pengelompokan data pegawai berdasarkan kriteria seperti jabatan, unit kerja, agama, pendidikan, dan kriteria lain.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diuraikan antara lain:

- a. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi permohonan data pegawai pada Pemerintah Kota Blitar?
- b. Bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem informasi permohonan data pegawai menggunakan *User Acceptance Testing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun sistem informasi permohonan data pada Pemerintah Kota Blitar yang dapat meningkatkan efisiensi dalam permohonan data kepegawaian serta mendukung transparansi.
- b. Menganalisis tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem informasi permohonan data dengan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengevaluasi kepuasan pengguna pada sistem yang dibangun.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan di Pemerintah Kota Blitar melalui penerapan sistem informasi permohonan data pegawai berbasis web, yang dapat menyederhanakan alur kerja, mengurangi pekerjaan manual yang berulang, dan menyediakan sistem pelacakan yang terpusat bagi pemohon.

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur tentang penerapan metode *Rapid Application Development* (RAD) dalam konteks sistem informasi pemerintahan, serta menjadi rujukan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses digitalisasi di sektor layanan publik

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menjauh dari tujuan pengembangan, maka dijabarkan terlebih dahulu batasan masalah berikut:

- a. Pengembangan aplikasi pada penelitian ini terbatas pada alur kerja permohonan data pegawai, sehingga sistem ini bukan sistem informasi kepegawaian yang mengelola seluruh aspek kepegawaian seperti penggajian, absensi, atau rekrutmen.
- b. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem informasi berbasis *web*. Penelitian tidak mencakup pengembangan aplikasi untuk platform lain seperti *mobile*.
- c. Data pegawai didapat secara internal dari basis data pihak mitra, dan belum terintegrasi secara penuh melalui API *real-time* dengan sistem eksternal.